

Ditulis oleh Penrem  
Kamis, 03 Agustus 2017 | 15:23 WIB

---



**Penrem 043/Gatam.**

Bandar Lampung (03/08), Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf Hadi Basuki, S.Sos, MM, M.Tr (Han), Kamis (3/8) sekira pukul 08.30 Wib mengisi materi Wawasan Kebangsaan dan Keislaman bagi Narasumber Dosen dan Pimpinan pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kamahasiswaan (PBAK) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, bertempat di Ruang Seminar lantai 3 (tiga) kampus UIN Raden Intan Lampung.

Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keislaman bagi Narasumber Dosen dan Pimpinan pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kamahasiswaan (PBAK) di UIN Raden Intan Lampung, di ikuti lebih kurang 200 orang Dosen dan Pimpinan UIN Raden Intan Lampung dengan Tema “ Membangun Budaya Akademik yang memiliki Integritas, Spiritualitas, dan Intelektualitas untuk mencegah Faham Radikal dan Intoleran “ diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari pengantar Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Dalam sambutan pembuka nya Rektor UIN Raden Intan Lampung menyampaikan, kepada peserta Workshop yang hadir tetap Konsentrasi dan Fokus demi kemajuan Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dan Rektor UIN memohon kepada Danrem 043/Gatam untuk sharing/berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta Workshop hari ini.

Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Hadi Basuki, S.Sos, MM, M.Tr (Han), menyampaikan materi dengan tema “ Mempertahankan Idiologi Pancasila melalui Bela Negara untuk menjaga keutuhan NKRI ” menurut Danrem 043/Gatam, ada 7 masalah yang mendasar yang perlu segera dibenahi di Negara kita ini : 1. Penegakan hukum, 2. Peraturan hukum yang tumpang tindih dan belum sejalan dengan Undang Undang, 3. Buruknya koordinasi baik dilingkungan

Ditulis oleh Penrem

Kamis, 03 Agustus 2017 | 15:23 WIB

---

sendiri maupun antar lembaga, 4. Kualitas penduduk yang masih menjadi persoalan, baik dari aspek Kompetensi maupun dari sisi Kesehatan, 5. Kwantitas Penduduk yang melebihi, masalah pengendalian penyebaran yang tidak merata dan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang tidak memadai, 6. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dan selalu berkelanjutan, 7. Desain pengelolaan anggaran belanja Negara yang belum memperhatikan aspek yang berkelanjutan.